



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted July 05, 2025, Approved September 15, 2025, Published Oktober 30, 2025

Pemahaman atau Tanggapan Masyarakat tentang Demokrasi dan Politik yang Terjadi di Sekitar Lingkungan Masyarakat Desa Powalutan

Seltia Wangkanusa¹, Romi Mesra²

^{1, 2} Universitas Negeri Manado

Email: 20606020@unima.ac.id¹, romimesra@unima.ac.id²

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan tanggapan masyarakat Desa Powalutan terhadap demokrasi dan politik yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap perangkat desa serta warga masyarakat dari berbagai latar belakang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap demokrasi bervariasi antar kelompok, di mana perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan warga biasa. Masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam musyawarah dan pemilihan umum, namun masih menghadapi tantangan berupa dominasi elite lokal, keterbatasan informasi, dan budaya politik paternalistik. Kesadaran politik generasi muda menjadi modal positif bagi perkembangan demokrasi lokal di Desa Powalutan ke depannya.

Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Literasi Politik, Partisipasi Masyarakat Desa

Abstract. This study aims to examine the understanding and responses of the people of Powalutan Village towards democracy and politics occurring in their environment. The method used was qualitative, with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews with village officials and residents from various backgrounds. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation techniques to ensure the validity of the findings. The results show that the community's understanding of democracy varies across groups, with village officials having a better understanding than ordinary residents. The community recognizes the importance of their role in deliberations and general elections, but still faces challenges such as the dominance of local elites, limited information, and a paternalistic political culture. The political awareness of the younger generation is a positive asset for the future development of local democracy in Powalutan Village.

Keywords: Local Democracy, Political Literacy, Village Community Participation

A. Pendahuluan

Pemahaman atau tanggapan masyarakat terhadap demokrasi dan politik di tingkat desa merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat nasional, tetapi juga harus diinternalisasi oleh masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk Desa Powalutan. Menurut Dahl (1989) dalam Gatara dan Said (2007), demokrasi sejati mensyaratkan partisipasi aktif warga negara dalam proses

pengambilan keputusan politik, sehingga pemahaman masyarakat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat desa berpotensi menjadi objek mobilisasi politik semata, bukan subjek yang aktif dalam proses demokrasi. Keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan politik menjadi faktor yang memperlemah kualitas demokrasi di tingkat akar rumput (Budiarjo, 2008).

Politik desa dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun demikian, Suhartono (2001) menegaskan bahwa perluasan ruang partisipasi tersebut tidak serta merta diikuti oleh peningkatan pemahaman politik masyarakat, sehingga potensi partisipasi yang ada kerap tidak termanfaatkan secara optimal. Fenomena ini mencerminkan bahwa demokrasi di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup serius. Masyarakat desa sering kali memiliki persepsi yang terbatas mengenai hakikat demokrasi, sehingga partisipasi yang muncul lebih bersifat prosedural daripada substantif (Wahyudi, 2012).

Desa Powalutan sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Indonesia bagian timur menjadi representasi menarik untuk dikaji, mengingat masyarakatnya hidup dalam konteks sosial budaya yang khas dan berinteraksi dengan sistem politik yang terus berkembang. Penelitian mengenai pemahaman politik masyarakat desa penting dilakukan karena kesadaran politik warga turut menentukan arah dan kualitas pembangunan desa itu sendiri. Menurut Almond dan Verba (1963) dalam Mas'ood dan MacAndrews (2006), budaya politik masyarakat yang partisipatif merupakan prasyarat bagi berjalannya sistem demokrasi yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami bagaimana masyarakat Desa Powalutan menanggapi dan memahami demokrasi serta dinamika politik yang terjadi di sekitar lingkungan mereka menjadi kajian yang sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surbakti (2010) mengenai pemahaman politik masyarakat pedesaan di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa memahami politik sebatas pada kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa, sementara dimensi politik yang lebih luas seperti advokasi kebijakan dan pengawasan pemerintah belum dipahami secara memadai. Temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi politik masyarakat desa perlu ditingkatkan secara sistematis melalui program pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. Sejalan dengan itu, penelitian Firmanzah (2008) tentang perilaku pemilih di daerah pedesaan mengungkapkan bahwa faktor kedekatan personal dengan kandidat, imbalan material, serta pengaruh tokoh agama dan adat jauh lebih dominan dalam mempengaruhi pilihan politik warga dibandingkan dengan pertimbangan ideologis atau programatik.

Sementara itu, Hidayat (2009) dalam penelitiannya tentang partisipasi politik masyarakat desa di Jawa Tengah menemukan bahwa tingkat partisipasi politik warga tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman mereka terhadap demokrasi. Banyak warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan, namun tidak memahami secara substantif nilai-nilai demokrasi yang mendasarinya. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya praktik patronase politik yang mengakar di level desa, di mana relasi antara warga dan elite lokal lebih bersifat transaksional daripada demokratis. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran awal bahwa persoalan pemahaman dan partisipasi politik di tingkat desa merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan struktural.

Terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan dalam kajian tentang pemahaman demokrasi dan politik masyarakat desa di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konteks wilayah Indonesia timur. Sebagian besar penelitian yang telah ada berfokus pada desa-desa di Jawa dan Sulawesi dengan latar belakang sosial budaya yang relatif homogen, sehingga temuan-temuannya belum tentu dapat

digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji perilaku pemilih dan tingkat partisipasi dalam pemilu, sementara aspek pemahaman masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem nilai dan cara pandang terhadap kehidupan politik sehari-hari masih sangat jarang diteliti secara mendalam.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana masyarakat desa merespons dinamika politik yang terjadi di lingkungan terdekat mereka, bukan hanya di level nasional atau regional. Penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei yang tidak mampu menangkap nuansa dan kedalaman persepsi serta pemahaman warga secara menyeluruh. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada konteks lokal yang spesifik, seperti Desa Powalutan, guna mengisi celah pengetahuan yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap masyarakat Desa Powalutan sebagai subjek kajian yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks pemahaman demokrasi dan politik lokal. Penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat partisipasi politik warga, tetapi juga berupaya memahami secara mendalam bagaimana masyarakat desa memaknai, menafsirkan, dan merespons fenomena demokrasi dan politik yang terjadi di sekitar lingkungan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam studi politik desa yang selama ini lebih terfokus pada aspek perilaku pemilih dan mobilisasi elektoral semata.

Selain itu, novelty penelitian ini juga terletak pada pengintegrasian perspektif budaya lokal dalam menganalisis pemahaman politik masyarakat desa, sesuatu yang jarang dilakukan dalam penelitian sejenis. Penelitian ini mengakui bahwa pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya setempat yang membentuk cara pandang dan nilai-nilai warga. Dengan menggabungkan kajian politik dengan perspektif sosiologi dan antropologi budaya, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang relasi antara masyarakat desa dengan sistem demokrasi yang berlaku.

Realitas yang terjadi di Desa Powalutan menunjukkan bahwa masyarakat setempat menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses politik. Sebagian besar warga desa masih menganggap politik sebagai urusan elite dan pemerintah semata, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara yang harus diemban secara bersama-sama. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi politik yang efektif dari pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil, sehingga warga kerap merasa asing dengan mekanisme demokrasi yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka.

Di sisi lain, dinamika politik yang terjadi di sekitar Desa Powalutan, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden, seringkali diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak sepenuhnya demokratis, seperti politik uang, tekanan dari kelompok tertentu, dan penyebaran informasi yang tidak berimbang. Realitas ini menciptakan persepsi negatif di kalangan sebagian warga terhadap sistem politik yang ada, sekaligus menimbulkan apatisme politik yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian tentang pemahaman dan tanggapan masyarakat Desa Powalutan terhadap demokrasi dan politik menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran dan literasi politik warga yang lebih baik.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, yang dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap

demokrasi dan politik di Desa Powalutan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek penelitian itu sendiri, bukan sekadar mengukur variabel secara statistik. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Dengan demikian, metode ini sangat tepat digunakan untuk mengungkap persepsi, sikap, dan pemahaman masyarakat desa yang bersifat subjektif dan kontekstual terhadap isu demokrasi dan politik di lingkungan mereka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Desa Powalutan untuk mengamati dinamika sosial politik yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk bagaimana warga berinteraksi dalam forum-forum musyawarah desa dan kegiatan politik lainnya.

Menurut Sugiyono (2016), observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain, sehingga observasi mampu menangkap realitas sosial yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara saja. Sementara itu, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara purposif, meliputi perangkat desa dan warga masyarakat dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan, guna mendapatkan perspektif yang beragam tentang pemahaman mereka terhadap demokrasi dan politik.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yakni melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan-temuan penelitian secara sistematis.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan valid. Creswell (2014) menegaskan bahwa triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas temuan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Desa Powalutan tentang Demokrasi dan Politik

Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan berdemokrasi di tingkat lokal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Powalutan, ditemukan bahwa masyarakat setempat menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam proses politik, khususnya dalam kegiatan musyawarah desa dan pengambilan keputusan kolektif. Masyarakat memahami bahwa mereka sendirilah yang akan menentukan dan memutuskan hasil suatu musyawarah yang dilakukan, sehingga kesadaran akan hak dan tanggung jawab politik mulai tumbuh di kalangan warga, meskipun belum merata di semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiardjo (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran politik warga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Hasil wawancara dengan Bapak selaku Sekretaris Desa Powalutan, berusia 56 tahun, memberikan gambaran yang cukup representatif tentang bagaimana kalangan perangkat desa memahami demokrasi politik. Menurut beliau, demokrasi politik merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan dalam proses politik tersebut warga negara memiliki hak untuk memilih serta kebebasan untuk berpendapat maupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pemahaman ini mencerminkan konsepsi demokrasi prosedural yang cukup baik dari kalangan aparatur desa, namun perlu diperdalam dengan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi yang lebih substansial. Menurut

Dahl (1989) dalam Gatara dan Said (2007), demokrasi tidak hanya mencakup prosedur pemilihan, tetapi juga mencakup jaminan hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sekertaris Desa Powalutan



Sumber: Data Primer

Tingkat pemahaman yang bervariasi antara perangkat desa dan warga biasa mencerminkan adanya kesenjangan literasi politik di Desa Powalutan. Warga yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang lebih tinggi dan terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi dibandingkan dengan warga yang tidak memiliki keterlibatan tersebut. Kondisi ini selaras dengan temuan Surbakti (2010) yang menyatakan bahwa pemahaman politik masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan intensitas keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial politik di lingkungannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi politik masyarakat Desa Powalutan perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Lingkungan Desa

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi di lingkungan desa sangat erat kaitannya dengan pengalaman langsung yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil observasi di Desa Powalutan, terlihat bahwa warga masyarakat memiliki persepsi yang cukup beragam mengenai bagaimana demokrasi dipraktikkan di lingkungan mereka, mulai dari penyelenggaraan musyawarah desa hingga pelaksanaan pemilihan umum. Sebagian warga menilai bahwa proses demokrasi di desa sudah berjalan dengan cukup baik, sementara sebagian lainnya masih merasakan adanya ketimpangan dalam hal keterwakilan suara dan transparansi pengambilan keputusan. Menurut Wahyudi (2012), persepsi positif masyarakat terhadap demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh pengalaman partisipasi yang bermakna dan rasa bahwa suara mereka benar-benar didengar dan dipertimbangkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Gustin Tulung, berusia 45 tahun, seorang ibu rumah tangga, menggambarkan perspektif warga biasa terhadap demokrasi politik. Menurut Ibu Gustin, demokrasi politik biasanya terjadi di kalangan masyarakat, karena demokrasi politik yang paling sering dirasakan adalah yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Perspektif ini menunjukkan bahwa bagi sebagian warga, demokrasi lebih dipahami sebagai praktik sosial yang terjadi di lingkungan terdekat mereka, bukan sebatas sistem formal yang dijalankan oleh negara. Pandangan ini sebenarnya mengandung nilai yang positif karena mencerminkan adanya internalisasi demokrasi ke dalam kehidupan komunitas, meskipun pemahaman tersebut masih perlu diperkaya dengan pengetahuan tentang dimensi formal demokrasi.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Gustin Tulung



Sumber: Data Primer

Perbedaan persepsi antara kelompok warga yang aktif terlibat dalam kegiatan politik desa dan mereka yang cenderung pasif menciptakan dinamika yang kompleks dalam kehidupan berdemokrasi di Desa Powalutan. Warga yang aktif terlibat cenderung memiliki persepsi yang lebih kritis dan evaluatif terhadap pelaksanaan demokrasi, sementara warga yang pasif lebih menerima keadaan apa adanya tanpa banyak melakukan penilaian. Firmanzah (2008) menjelaskan bahwa perbedaan tingkat keterlibatan politik warga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman organisasi, akses informasi, dan keyakinan tentang efektivitas partisipasi mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menciptakan ruang-ruang partisipasi yang inklusif di Desa Powalutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi lokal.

3. Tantangan dan Dinamika Politik di Lingkungan Desa Powalutan

Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan hasil observasi di Desa Powalutan, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh lokal dalam mewarnai proses pengambilan keputusan politik di desa, sehingga ruang bagi warga biasa untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas masih terbatas. Di samping itu, penyebaran informasi politik yang tidak merata juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dalam memahami dan mengikuti perkembangan politik yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Hidayat (2009), dominasi elite lokal dalam politik desa merupakan hambatan struktural yang umum ditemukan di banyak desa di Indonesia dan perlu diatasi melalui penguatan kapasitas warga dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat.

Masyarakat Desa Powalutan juga menghadapi tantangan dalam membedakan antara partisipasi politik yang bersifat substantif dan yang bersifat mobilisasi semata. Dalam beberapa kesempatan, warga dilibatkan dalam kegiatan politik bukan karena kesadaran dan inisiatif mereka sendiri, melainkan karena dorongan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya politik yang berkembang di Desa Powalutan masih memiliki unsur-unsur paternalisme yang perlu diubah melalui proses pendidikan politik yang berkelanjutan. Almond dan Verba (1963) dalam Mas'oed dan MacAndrews (2006) membedakan antara budaya politik partisipan yang ideal dengan budaya politik subjek yang masih banyak ditemukan di masyarakat berkembang, di mana warga lebih berperan sebagai penerima kebijakan daripada penentu kebijakan.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, terdapat tanda-tanda positif yang menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Desa Powalutan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Generasi muda desa mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap isu-isu politik lokal dan nasional, serta semakin kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah desa. Keterlibatan pemuda dalam forum-forum musyawarah desa dan kegiatan sosial politik lainnya merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi masa depan demokrasi di Desa Powalutan. Menurut Suhartono (2001), regenerasi kepemimpinan dan partisipasi generasi muda dalam politik desa merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dan kualitas demokrasi lokal dalam jangka panjang, sehingga potensi ini perlu terus dikembangkan dan difasilitasi oleh seluruh pemangku kepentingan di desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Powalutan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan politik masih berada pada taraf yang bervariasi antara satu kelompok warga dengan kelompok lainnya. Kalangan perangkat desa dan warga yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial politik memiliki pemahaman yang relatif lebih baik, sementara warga biasa seperti ibu rumah tangga dan kelompok yang kurang terlibat dalam kegiatan organisasi cenderung memahami demokrasi secara lebih sederhana dan berbasis pengalaman keseharian. Meskipun demikian, seluruh lapisan masyarakat pada dasarnya menyadari pentingnya peran mereka dalam proses politik desa, terutama dalam kegiatan musyawarah dan pemilihan umum, yang menunjukkan bahwa benih kesadaran demokratis sesungguhnya telah ada dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dinamika politik yang terjadi di lingkungan Desa Powalutan masih diwarnai oleh sejumlah tantangan, antara lain dominasi elite lokal dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses informasi politik, serta budaya politik yang masih cenderung paternalistik. Namun demikian, terdapat perkembangan positif yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu-isu politik lokal dan semakin terbukanya ruang partisipasi warga dalam forum-forum desa. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi politik warga, sehingga demokrasi di Desa Powalutan dapat berkembang dari sekadar prosedur formal menjadi sebuah nilai yang benar-benar dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., dan Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, A. A. S., dan Said, M. D. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Pustaka Setia.
- Hidayat, S. (2009). Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Umum di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 112-128.
- Mas'oed, M., dan MacAndrews, C. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suhartono. (2001). Politik Lokal: Parlemen Desa, Awal Kemerdekaan sampai Masa Reformasi. Laper Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wahyudi, A. (2012). Demokrasi dan Partisipasi Politik di Pedesaan Indonesia. Jurnal Sosial Politik, 6(1), 45-63.